

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POS KERJA TANJUNG
BERLIAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
TANJUNG BERLIAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN**

HENDRA DINATA. 0901135092

EMAIL: medita.novita@yahoo.com

PEMBIMBING : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si.

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Negara – Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bima Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
– Telp/Fax. 0761-6377

ABSTRACT

Kundur Islands is one of uplift in the Riau Islands province, Kundur Island is one of a small town with shipping activity. No wonder if in Kundur Island harbors many of the people there. To manage all the activities in all the ports of the people in the region Kundur islands, then Pos formed under the auspices of the Working Syahbandar Implementation Unit Port (KUPP) Kundur. According to Law No. 17 of 2008 on the cruise, carry out the functions of the port safety and security of shipping which includes implementation, monitoring and enforcement in the field of transport in the waters, ports, and maritime environmental protection at the port. However, based on the authors observations Tanjung Berlian, still a lot of the discrepancy between theory and practice that occur in the field. Examples are as follows: lack of a clear process of issuance of Letter of Approval Sailing (SPB) for shipping agents in ports, Less neat and completeness of documents manning ships that operate in the Post Employment Cape Diamond, Less conduct surveillance and Sailing Bandar tongue in their respective work stations.

Based on the above phenomena, the formulation of the problem in this research is: How Workplace Effectiveness of Post Office Task Execution Unit Operator Tanjung Diamond District of North Kundur, Karimun and Factors Affecting Implementation Task Effectiveness of Post Employment Cape Diamond District of North Kundur Karimun.

The purpose of this study was to examine the effectiveness of the Post Implementation Task Work Cape Diamond, North Kundur, Karimun Regency and Knowing the factors that influence the effectiveness of post work assignments Cape Diamond. Theory (approach) is used as an analytical tool in this study is about the effectiveness of the proposed theory by Sumaryadi (2005: 105) effectiveness is how well the work take place, where a person menghaliskan sjauh output as expected. While the research methods used in this study is descriptive qualitative research that is intended to provide an overview of systematic explanation of the observed phenomenon.

Based on the results of field research on the effectiveness of the writer peaksanaan task Cape Diamond workstations running the Less Well, it can be seen from inspection of the complete document indent indicator ship and crew as well as the issuance of Letter of Approval process indicators that are sailing in the unfavorable category. So far the implementation of the tasks performed are

administrative in nature but only in the form directly in the field pelaksanaan task is still very rare.

Keywords: *Efectiviness, Implementation, Principal Duties and Functions.*

PENDAHULUAN

Dua pertiga wilayah Indonesia berupa perairan. Ribuan pulau berjajar dari Sabang sampai Merauke. Posisi negeri ini sangat strategis karena berada di persilangan rute perdagangan dunia. Ironisnya Indonesia tak mampu memanfaatkan peluang emas itu. Sebagai negara kepulauan, peranan pelabuhan sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas barang dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk menghubungkan antarpulau maupun antarnegara. Namun, ironisnya, kondisi pelabuhan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hampir semua pelabuhan yang ada di Indonesia saat ini sudah ketinggalan zaman.

Di luar masalah amburadulnya pengelolaan pelabuhan di Indonesia, pasca implementasi Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kini terbuka persaingan dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan. Rencana pembangunan pelabuhan hub port pun mencuat. Yang menjadi pertanyaan besar, mampukah Pelindo, sebagai operator pelabuhan Indonesia, bersaing dengan pelabuhan di luar negeri yang lebih baik?

Secara geografis Indonesia sangat diuntungkan dalam sistem perdagangan internasional melalui laut (sea borne traffic) karena menjadi lintasan kapal niaga dari mancanegara. Namun, keuntungan

itu tidak dapat dioptimalkan sebagai sebuah peluang karena kebijakan yang keliru.

Fungsi pelabuhan terhadap pembangunan perekonomian suatu daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya pelabuhan, maka terbuka kesempatan untuk mengadakan aktivitas perdagangan antar daerah dan antar Negara.
2. Dengan terciptanya perdagangan luar negeri, maka memungkinkan akan adanya peningkatan devisa dari sektor barang dan impor.
3. Tarif bongkar muat dipelabuhan mempunyai pengaruh terhadap harga jual barang yang akan di ekspor dan impor.
4. Pendapatan Negara akan meningkat selaras dengan meningkatnya aktivitas ekspor dan impor yang menggunakan fasilitas pelabuhan.

Melihat kedudukan dan fungsi pelabuhan sebagai terminal dan pintu gerbang perekonomian, sarana dan prasarana dengan nilai strategis, mata rantai angkut nasional, serta titik temu antar pulau, dan sentral produksi pusat-pusat akomodasi. Maka upaya peningkatan pelayanan di wilayah pelabuhan harus ditunjang dengan fasilitas, sarana prasarana yang baik guna mewujudkan suatu kesatuan ekonomi nasional.

Pelabuhan merupakan salah satu penunjang kegiatan pelayaran yang bertujuan memperlancar arus

barang dan orang dari satu tempat ketempat lain, Selain itu aktivitas pelayaran juga menjadi sangat berperan dikarenakan dari sini akan terjadi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat dalam menjual barang hasil-hasil bumi daerah setempat. Untuk itulah pemerintah melalui dirjen perhubungan laut dibawah naungan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dibentuk suatu badan pemerintah bernama Syahbandar untuk melayani serta menjalankan aktivitas administrasi negara dilingkungan pelabuhan.

Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkut di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. UU No. 17/2008 tentang pelayaran berbunyi sebagai berikut:

1. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu, (Pasal 1, Ayat 33: UU No 17 tahun 2008).
2. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi,

bangunan perseminan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, (Pasal 1, Ayat 34. UU No 17 tahun 2008).

3. Kapal adalah kendaraan dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, (Pasal 1, Ayat 36. UU No 17 tahun 2008).

Jadi dapat dilihat berdasarkan dua ayat diatas bahwa komponen dari kelaiklautan kapal menurut peraturan di Indonesia adalah ditentukan dalam persyaratan sebagai berikut:

1. Keselamatan kapal;
2. Pencegahan pencemaran perairan dari kapal;
3. Pengawasan;
4. Pemuatan;
5. Kesejahteraan awak kapal;
6. Kesehatan penumpang;
7. Status hukum kapal;

Kepulauan Kundur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana daerah ini terbagi dari tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Kundur, Kundur Utara, dan Kundur Barat. Pulau Kundur merupakan salah satu Kota kecil dengan

aktivitas pelayaran. Tak heran jika di Kepulauan Kundur banyak terdapat pelabuhan- pelabuhan rakyat. Untuk mengatur segala aktivitas di semua pelabuhan rakyat di wilayah Kepulauan Kundur, maka dibentuk Pos Kerja Syahbandar dibawah naungan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Kundur.

Salah satu Pos Kerja tersebut adalah Pos Kerja Tanjung Berlian yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas Nomor KP. 104/1/119/UPP. Adapun isi surat tersebut ialah sebagai berikut :

1. Petugas Pos Kerja Tanjung Berlian :

Membantu Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan dan bertanggung jawab atas pemberian pelayanan lalu lintas angkat laut, keamanan dan keselamatan pelayanan di Pos Kerja masing-masing, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penilikan dan pengawasan keselamatan pelayaran di Pos Kerja masing-masing.
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan kelengkapan pengawakan pada kapal yang beroperasi di Pos Kerja masing-masing.
- c. Melakukan penilikan dan pengawasan Tertib Bandar dan Berlayar di Pos kerja masing-masing.

- d. Memberikan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada kapal beroperasi di Pos kerja sesuai pendelegasian Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) /Syahbandar.
- e. Memberikan bantuan SAR di Pos Kerja maning-masing.
- f. Menyampaikan laporan kunjungan kapal, barang, hewan dan penumpang (Pelaporan Kedatangan Kapal/PKK 29, PKK 27 dan Sistem Informasi Operasi Pelayaran/SIMOPEL) di pos kerja masing-masing kepada Kepala KUPP.
- g. Melakukan Pemungutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pos kerja masing-masing dan melaporkan serta menyetorkan kepada KUPP .(Bendahara penerima).
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.
- i. Memelihara barang-barang inventaris milik negara yang dimilikinya.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsungnya baik

lisan maupun tulisan, serta dalam pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan para petugas dilingkungan KUPP Tanjung Batu Kundur.

2. Pemrosesan Surat Persetujuan Berlayar/Pelaksanaan Pos Kerja Tanjung Berlian :
Melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab membantu Pimpinan, atas pemberian pelayanan lalu lintas angkut laut, keamanan pelayaran di Pos Kerja Tanjung Berlian, dengan tugas-tugas antara lain :
 - a. Menyiapkan data/bahan dibidang kesyahbandaran.
 - b. Mengagendakan/mencatat permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
 - c. Mempersiapkan/mengetik Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
 - d. Mempersiapkan laporan pengeluaran Surat Persetujuan Berlayar setiap bulannya.
 - e. Mengarsip dan menyimpan berkas kelengkapan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
 - f. Mempersiapkan laporan bulanan operasional (PKK dan SIMOPEL) setiap bulannya.
 - g. Membantu pungutan PNBPN.
 - h. Mempersiapkan laporan PNBPN setiap bulannya.
 - i. Membantu melakukan pengawasan dan mengamankan turun/naik penumpang dan barang dikapal.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan

langsung baik lisan maupun tulisan.

Berdasarkan teori diatas maka, jelas tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Tanjung Batu kepada Pos Kerja Tanjung Berlian pada bidang pemrosesan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau pelaksana Pos Kerja di pelabuhan Tanjungberlian.

Namun berdasarkan Observasi penulis pada pelabuhan Tanjung Berlian, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi dilapangan. Contohnya adalah sebagai berikut :

1. Kurang jelasnya proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi agen-agen pelayaran dipelabuhan.
2. Kurang rapinya pemeriksaan dokumen kapal dan kelengkapan pengawakan yang beroperasi di Pos Kerja Tanjung Berlian.
3. Kurang melakukan penilikan Tertib Bandar dan Berlayar di pos kerja masing-masing.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis jelaskan dihalaman sebelumnya terkait beberapa pelaksanaan tugas yang dilakukan petugas Pos Kerja Tanjung Berlian masih terdapat ketidak sesuaian antara teori dengan praktek, maka hal ini memicu penulis untuk merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian?

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian, Kundur Utara, Kabupaten Karimun.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja Tanjung Berlian.

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah penulis didalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja Tanjung Berlian (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) Kundur Utara, Kabupaten Karimun.

Informan dalam penelitian ini adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi atau kelengkapan mengenai objek penelitian key person ini adalah tokoh formal dan informal. Tokoh formal yakni Syahbandar pelabuhan Tanjung Berlian, sedangkan tokoh informal Agen pelayaran, kapten kapal dan anak buah kapal yang memahami tentang objek penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian**

Dalam menjabarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara yang sesuai dengan kerangka berfikir yang telah dibuat penulis dengan acuan dari teori efektivitas yang dikemukakan oleh

Sumaryadi, 2005 yaitu Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang mengaliskan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

Dari teori efektivitas tersebut Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal.
2. Proses pembuatan Surat Persetujuan Berlayar.
3. Jam kerja petugas dilapangan.
4. Melakukan penilikan tertib bandar dan berlayar.

Penjabaran mengenai indikator tersebut akan tersaji seperti dibawah ini:

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal

Indikator dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal dapat di ukur dari:

- a. Apa saja wewenang dari syahbandar atau petugas Pos Kerja Tanjung Berlian.
- b. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan kelengkapan awak kapal dan dokumen kapal.
- c. Apa saja pengawasan yang dilakukan syahbandar, demi menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- d. Bagaimana cara pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal terkait kejelasan hukum dokumen kapal.

Dari hasil penelitian antara penulis dengan informan penelitian didapati bahwa Syahbandar dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal masih kurang rapi dan kurang efektif,

dikarenakan masih memilih kapal yang mana yang harus di tindak tegas sesuai dengan yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu cara untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan tugas Pos Kerja pelabuhan Tanjung Berlian dalam menjalankan tugasnya adalah rapinya pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal, hal ini tentu menjadi penunjang dalam tercapainya keamanan dan keselamatan pelayaran. Namun dari hasil wawancara dengan key informan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal adalah Kurang Baik, hal ini dikarenakan petugas Pos Kerja Tanjung Berlian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dan turut membantu pemerintah dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran masih terbilang kurang efektif dikarenakan masih ada kurang maksimalnya pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal sejauh ini petugas Pos Kerja hanya memeriksa dokumen yang masuk pada kantor dan belum ada pemeriksaan yang bersifat langsung atau langsung mengawasi dilapangan atas segala kegiatan yang terjadi di pelabuhan Tanjung Berlian.

2. Proses Pembuatan Surat Persetujuan Berlayar.

Indikator dari proses pembuatan surat persetujuan berlayar dapat diukur dari:

- a. Apa dasar hukum dalam pembuatan Surat Persetujuan Berlayar.

- b. Berapa lama proses dari pembuatan Surat Persetujuan Berlayar.
- c. Apa saja yang menjadi syarat dalam pembuatan Surat Persetujuan Berlayar.
- d. Koordinasi dengan instansi diwilayah kerjanya.

Dari hasil penelitian antara penulis dengan informan penelitian didapati bahwa pada indikator proses pembuatan Surat Persetujuan Berlayar adalah Kurang Baik. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan Surat Persetujuan Berlayar belum ada campur tangan yang lebih dalam oleh pihak Syahbandar atau Pos Kerja Tanjung Berlian, hal ini tentu berimbas tidak baik terhadap penegakan hukum dan undang-undang yang seharusnya dilakukan.

3. Jam Kerja Petugas Dilapangan.

Indikator dari jam kerja petugas dilapangan dapat diukur dari:

- a. Seberapa sering petugas pos kerja Tanjung Berlian menggunakan jam kerjanya untuk menjalankan tugas yang di berikan.
- b. Seberapa lama petugas pos kerja berada di pos, dalam menjalankan tugas nya.
- c. Apakah petugas Pos Kerja atau Syahbandar selalu turun dan ikut mangawasi kegiatan dilapangan.

Dari hasil penelitian antara penulis dengan informan penelitian didapati bahwa Petugas Pos Kerja Tanjung Berlian dalam penggunaan waktu kerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sudah terbilang baik karena Petugas senantiasa berada dikantor selama masih ada jadwal keluar masuknya kapal dipelabuhan Tanjung Berlian.

4. Melakukan penilikan tertib Bandar dan Berlayar.

Indikator dari pelaksanaan penilikan dan pengawasan tertib bandar dan berlayar dapat diukur dari:

- a. Bagaimana bentuk penilikan dan pengawasan tertib bandar dan berlayar.
- b. Pengawasan dibidang pencemaran limbah air laut.
- c. Pengawasan naik turun penumpang dan barang dikapal.
- d. Apakah pernah dilakukan pengawasan naik turun penumpang dan barang dikapal.

Syahbandar yang diangkat langsung oleh menteri dan diberikan wewenang atau kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengawasi segala bentuk kegiatan yang terjadi dipelabuhan, demi terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan keinginan dan tujuan dari pemerintah dan setiap masyarakat.

Dari hasil penelitian antara penulis dengan informan penelitian didapati bahwa pada indikator pelaksanaan penilikan tertib bandar dan berlayar tergolong Baik. Hal ini dikarenakan petugas Pos Kerja telah melakukan pelaksanaan penilikan tertib bandar dan berlayar dengan baik, hanya saja tingkat pemahaman masyarakat terhadap apa yang telah ditetapkan petugas masih sangat kurang ditambah dengan jumlah SDM yang sangat minim mengakibatkan pelaksanaan penilikan tertib bandar dan berlayar ini sulit tercapai dengan maksimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian.

Dalam proses penelitian ini sesuai dengan kerangka pemikiran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian, maka sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian diantaranya adalah Keadaan petugas Pos Kerja Tanjung Berlian dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana model kerja Pos Kerja Tanjung Berlian?
- b. Bagaimana tingkat kelengkapan sarana dan prasarana petugas Pos Kerja Tanjung Berlian?
- c. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung terciptanya efektifitas pelaksanaan tugas Pos Kerja Tanjung Berlian?
- d. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat terciptanya efektifitas pelaksanaan tugas Pos Kerja Tanjung Berlian?

Yang mana dari hasil penelitian antara penulis dengan informan penelitian didapati bahwa dalam bentuk sarana prasarana, Pos Kerja Tanjung Berlian membutuhkan kendaraan operasional yang akan membantu mereka menjalankan tugas dan juga kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang ketenaga kerjaan yang masih sangat dibutuhkan Pos Kerja Tanjung Berlian.

2. Partisipasi masyarakat

Keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam menjalankan dan menaati segala bentuk peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh petugas Pos Kerja akan sangat membantu dalam

menentukan tingkat keefektifan pelaksanaan tugas Pos Kerja Tanjung Berlian. Dari hasil penelitian yang didapat penulis menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian masih sangat kurang.

Apabila masyarakat tidak dapat membantu dalam melakukan partisipasi yang berupa ketaatan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat maka keberhasilan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akan sangat susah diperoleh, karna tidak adanya sinergi antara petugas dengan masyarakat, hasilnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan diharapkan sesuai dengan hasil yang diinginkan akan terlepas dengan sia-sia.

Dari hasil penerapan dua faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja Tanjung Berlian, yang paling mempengaruhi adalah tingkat partisipasi masyarakat, dengan keadaan pos kerja Tanjung Berlian dan keikutsertaan masyarakat dalam menaati peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh petugas, maka efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja Tanjung Berlian akan terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu diminta kepada masyarakat dan petugas Pos Kerja Tanjung Berlian untuk ikut serta menaati peraturan dan kebijakan yang telah diberikan demi terlaksananya keselamatan dan keamanan pelayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja (Kantor Unit Penyelenggaraan

Pelabuhan) Tanjung Berlian kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang telah diambil dari hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dan beberapa kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan mengenai efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja Tanjung Berlian berjalan dengan Kurang Baik, dimana dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala bentuk kegiatan yang terjadi di pelabuhan, Syahbandar dan petugas pos kerja lainnya masih banyak terdapat kekurangan hal ini dapat dilihat dari indikator melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal dan juga indikator proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang berada pada kategori kurang baik. Sejauh ini tugas yang dilakukan bersifat pelaksanaan yang hanya bersifat administratif namun dalam bentuk pelaksanaan tugas langsung dilapangan masih sangat jarang dilakukan, hal ini tentunya berimbas pada tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran yang merupakan tujuan dari tugas dan fungsi pos kerja Tanjung Berlian. Ada pun hal yang mempersulit efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja Tanjung Berlian dalam menjalankan tugasnya

dengan sebagaimana mestinya adalah masih sangat kurangnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, sehingga petugas pos kerja dalam melaksanakan tugas secara langsung dilapangan sangat kesulitan maka dari itu pada hasil indikator yang berbentuk pelaksanaan tugas secara langsung dilapangan yang telah disusun penulis dalam penelitian ini berada dalam kategori Kurang Baik, hal mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas pos kerja (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) Tanjung Berlian yang belum berjalan dengan sempurna ataupun dengan baik.

2. Dalam menjalankan efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) Tanjung Berlian kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ini. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut yaitu keadaan petugas pos kerja Tanjung Berlian yang masih mengalami kekurangan sumber daya manusia yang mempuni dibidang ini sehingga dalam bentuk pengawasan langsung dilapangan masih sangat jarang dilakukan serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai ditambah lagi dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menaati peraturan maupun kebijakan yang telah dibuat oleh

petugas pos kerja. Dari faktor-faktor yang telah penulis sebutkan diatas maka faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pos kerja Tanjung Berlian adalah faktor partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2004.
- Brantas. *Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dharma, Surya. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintah Dinegara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Hamin, Sofian. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru, Pustaka Nasional, 2005.
- Handoko, Hani T. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Hartono, J.H. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang pelayaran.
- Manulang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada university press, 2006.
- Priansa dan Agus Granida. *Manajemen Perkantoran (Efektif, Efisien, dan Profesional)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Robbins P.Stephen, *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT.

- Indeks Kelompok Gramedia, 2003.
- Siagian P. Sondang. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Siagian P. Sondang. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Siswanto. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Siagian SP, Kepemimpinan dan Perilaku. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Soeprihartono, Jhon, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan. Yogyakarta: LP3E, 1980.
- Steers, Richard. M, Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Steers, Richard. M, Efektivitas Kerja Definisi Faktor Yang Mempengaruhi Alat Ukur Efektivitas Kerja.<http://informasiku.com.htm/efektivitas-kerja> definisi faktor-yang-mempengaruhi-dan-alat-ukur-efektivitas-kerja.1980.
- Sudarmanto. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sugiono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumaryadi, Nyoman, Efektivitas Implementasi. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Sunyoto, Danang. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2012.
- Dokumentasi :
 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.
 Tatanan Kepelabuhanan Nasional Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002.
 Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP.104/1/119/UPP.
 Stuktur organisasi Pos Kerja Tanjung Berlian.